



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : KURNIAWAN CATUR ANDRIANTO  
2. Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
MATARAM  
3. NHK : 148741

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 179 m2/66 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000  
2. Tanah dan Bangunan Seluas 391 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 2.450.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 14.000.000

1. MOTOR, SUZUKI SHOGUN SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000  
2. MOTOR, HONDA SPACY SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 31.090.800

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 60.500.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 3.055.590.800

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.055.590.800

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.